



DJKN

LAPORAN KINERJA KANWIL DJKN DKI JAKARTA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan-RB Nomor 53/2014), Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sebagai instansi pemerintah perlu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi.

Visi DJKN dan Visi Kanwil DJKN DKI Jakarta yaitu *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*, Kanwil DJKN DKI Jakarta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan yang tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN DKI Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, perlu dijabarkan realisasi pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan untuk tahun 2024 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta mencapai 115.25% (seratus lima belas koma dua puluh lima persen). Nilai yang terdiri atas Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective* (33.35%), *customer perspective* (23.95%) *internal process perspective* (28.88%), dan *learning and growth perspective* (29,07%).

Dengan disusunnya LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 ini diperoleh gambaran yang jelas dan lugas mengenai kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan termasuk masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Tahun 2024 Kanwil DJKN DKI Jakarta terus berupaya untuk mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) yang telah diraih pada tanggal 6 Desember 2023.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada pengguna layanan, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta periode berikutnya.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku instansi vertikal DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 (lima) KPKNL, yaitu KPKNL Jakarta I sampai dengan KPKNL Jakarta V.

Kanwil DJKN DKI Jakarta satu-satunya Kanwil DJKN yang bertempat di Jakarta, sehingga mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan/operasional DJKN. Oleh karena itu, dalam menyukseskan peran strategis tersebut Kanwil DJKN DKI Jakarta mengemban visi DJKN yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut DJKN menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

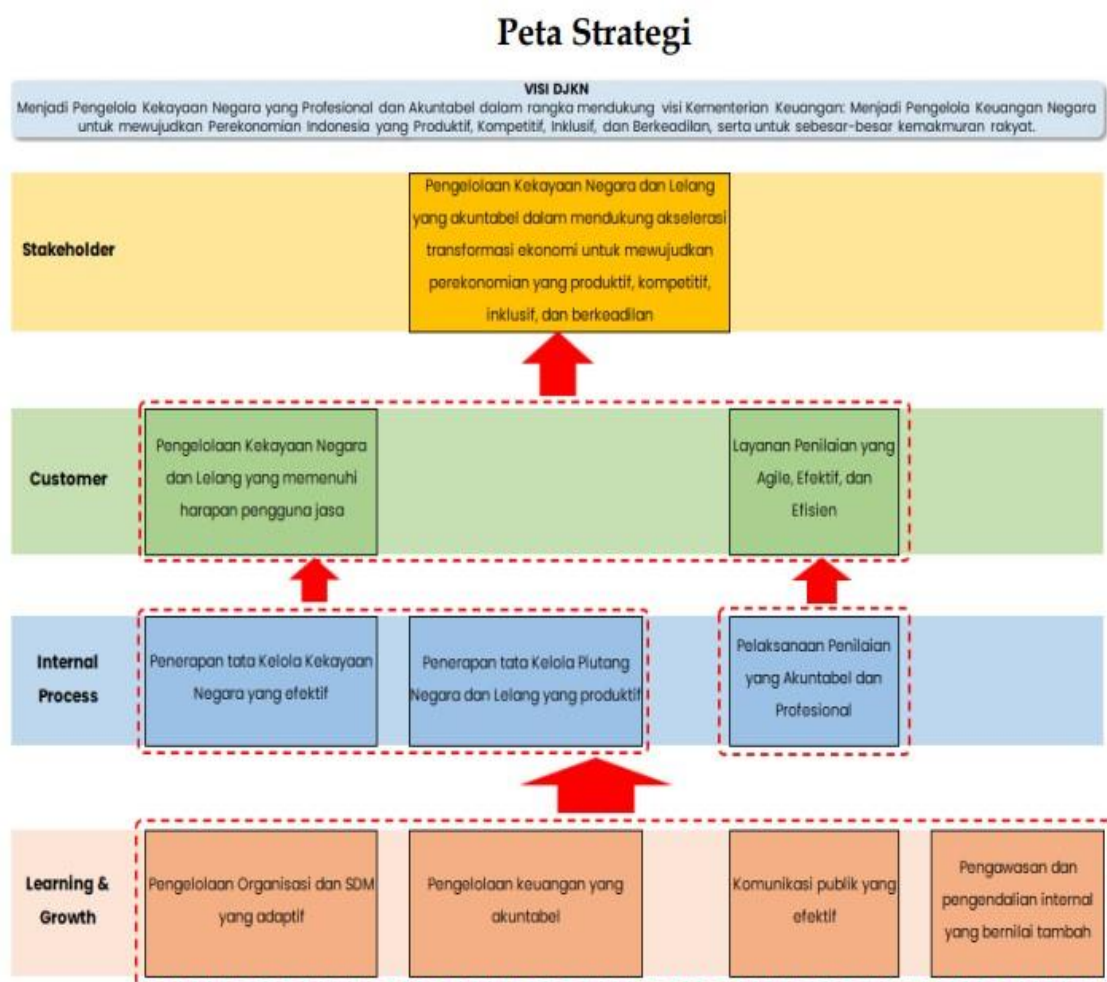
Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing IKU dan hasil yang dicapai dari masing-masing IKU tersebut. Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengelolaan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;

- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Untuk mengukur kinerjanya, Kanwil DJKN DKI Jakarta menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif untuk perencanaan strategis, alat untuk menterjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian kinerja berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peta Strategis.

Sasaran strategis dan IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai berikut :



Tahun 2024 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil menyelesaikan kinerjanya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pada awal tahun anggaran. Dari 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Two*, seluruh IKU dapat tercapai dan/atau melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Rincian target dan realisasi IKU *Kemenkeu-Two* tersaji sebagai berikut.

Tabel Target dan Realisasi IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi 31 Des 2024	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						33.35%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							111.18%	
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	P/L	100%	112.19%	19%	37%	112.19%	112.19%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89.17	92.44	19%	37%	103.67%	103.67%	hijau
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	125.49%	14%	27%	125.49%	120.00%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						23.95%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna Jasa							120.00%	
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/M	100%	118.56%	14%	33%	118.56%	118.56%	hijau
	Sub IKU 1: 2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71.50%	88.76.29%			124.14%	120.00%	hijau
	Sub IKU 2: 2a2-N Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/M	86.50%	97.74%			112.99%	112.99%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	122.62%	14%	33%	122.62%	120.00%	hijau
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100%	193%	14%	33%	192.93%	120.00%	hijau
3	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien							120.00%	
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	P/M	75	95.89	14%	100%	127.85%	120.00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28.88%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							112.12%	
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	104.25%	14%	50%	104.25%	104.25%	hijau
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	132.08%	14%	50%	132.08%	120.00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							114.46%	
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	70%	63.75%	14%	50%	108.93%	108.93%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	108.54%	14%	50%	121.95%	120.00%	hijau
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							120.00%	
6a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0.20%	14%	100%	198.73%	120.00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29.07%	
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							118.70%	

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	98.69	14%	33%	116.11%	116.11%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	P/M	75%	102.70%	14%	33%	136.93%	120.00%	hijau
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100.00	120.00	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8b-N	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
9	Komunikasi publik yang efektif							120.00%	
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55	5.02	14%	50%	141.41%	120.00%	hijau
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100.00	14%	50%	125.00%	120.00%	hijau
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							106.37%	
10a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	87.00	14%	100%	106.37%	106.37%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115.25%	

Dengan LAKIN ini kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	6
D. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	11
C. Pengukuran Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Kinerja Lainnya	42
C. Realisasi Anggaran	45
D. Inovasi	46
E. Penghargaan dan Achievement	47
BAB IV PENUTUP	49

LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	



BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi
 - Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta
 - Sistematika Laporan
- 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama setahun yakni untuk Tahun 2024. LAKIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kanwil DJKN DKI Jakarta merupakan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kanwil DJKN DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- f. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengelolaan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
- j. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengelolaan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Kanwil DJKN DKI Jakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik Negara di lingkungan kantor wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan Negara.

3. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, property khusus dan usaha.

4. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang Negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang Negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

Struktur organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini.



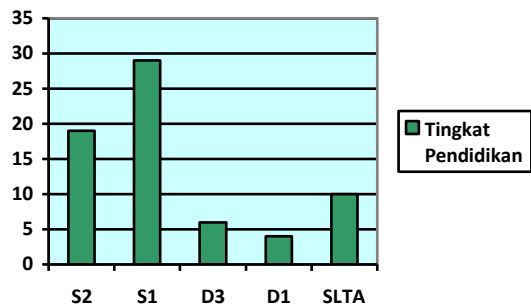
Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJKN DKI Jakarta yang merupakan instansi vertikal Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibantu oleh Kepala Bagian Umum, 5 (lima) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala KPKNL, Pejabat Fungsional dan pegawai dengan berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum dan lain-lain.

Jumlah pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, per 31 Desember 2024 berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang dengan komposisi yang sama antara pria dan wanita, masing-masing 34 (tiga puluh empat) orang. Adapun komposisi pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, golongan, dan jabatan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

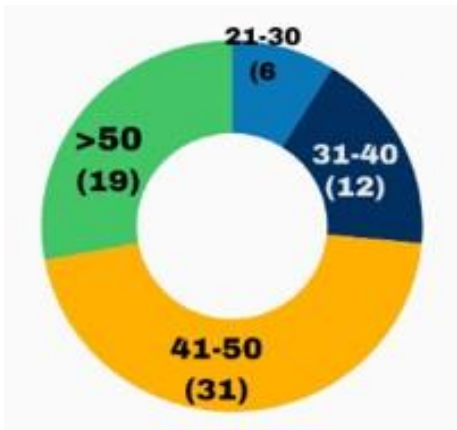


Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



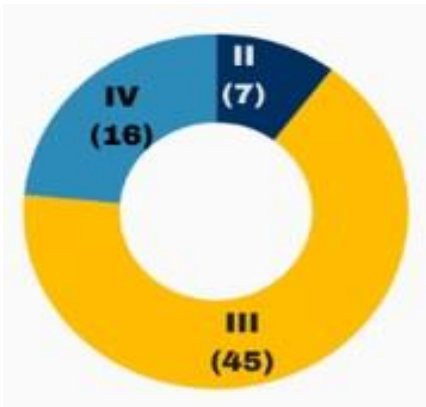
Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	19
S1	29
D3	6
D I	4
S L T A	10
TOTAL	68

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur



Kelompok Umur	Jumlah
21 – 30	6
31 – 40	12
41 – 50	31
> 50	19
TOTAL	68

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	15
Pelaksana	41
Penilai Pemerintah Ahli Madya	1
Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
Penilai Pemerintah Ahli Pertama	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1
Penata Laksana Barang Terampil	1
Jumlah	68

C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi DKI Jakarta yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yaitu:

1. KPKNL Jakarta I
2. KPKNL Jakarta II
3. KPKNL Jakarta III
4. KPKNL Jakarta IV
5. KPKNL Jakarta V

Kanwil DJKN DKI Jakarta diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani bidang pengurusan piutang negara, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang mempunyai peran strategis sebagai berikut:

- a. Memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berupa pengelolaan Barang Milik Negara, biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang;
- b. Membina, mengelola, menatausahakan, dan mengamankan aset negara berupa barang jaminan;
- c. Menyajikan dan melaporkan perkembangan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara;
- d. Meningkatkan citra pengurusan piutang negara dan lelang;
- e. Membina dan mengawasi kinerja aparatur di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) DJKN tahun 2024 berupa penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp2.384.112.942.619,00, sedangkan target PNBP Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebesar Rp615.084.700.000,00 atau sebesar 25,79% dari target DJKN. Tantangan target PNBP ini mampu dijawab oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL di wilayah kerjanya dengan perolehan PNBP yang melampaui target yaitu sebesar Rp771.844.860.958.00 atau sebesar 125%.

Wilayah Kerja dan Pengguna Jasa Kanwil DJKN DKI Jakarta



D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja,.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, realisasi anggaran, inovasi, penghargaan dan achievement.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN DKI Jakarta selama Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan kegiatan-kegiatan yang diuraikan laporan ini. Dengan disusunnya LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta di tahun mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
 - Perjanjian Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
- 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Rencana Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Kanwil DJKN DKI Jakarta tetap mengacu pada Visi yang telah ditetapkan yaitu : ***"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"***

Sebagai wujud penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 5 (lima) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN DKI merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, adalah :
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal.
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai tujuan Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta yang akan ditempuh adalah :

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:
 - a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga.
 - b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
 - c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
 - d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;
2. Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah :
 - a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip ecommerce baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan startup di bidang marketplace.
 - b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.
3. Strategi yang dilakukan untuk mencapai penilaian yang berkualitas adalah :
 - a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
 - b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN.
 - b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi.
 - c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.
 - d. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara.
 - e. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan.
 - f. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.
 - g. Penguatan unit kepatuhan internal di DJKN.
 - h. Peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kanwil DJKN DKI Jakarta melaksanakan “Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang”.

Sasaran Program (*outcome*): Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal serta Mampu membangun Citra Baik bagi *stakeholder*.

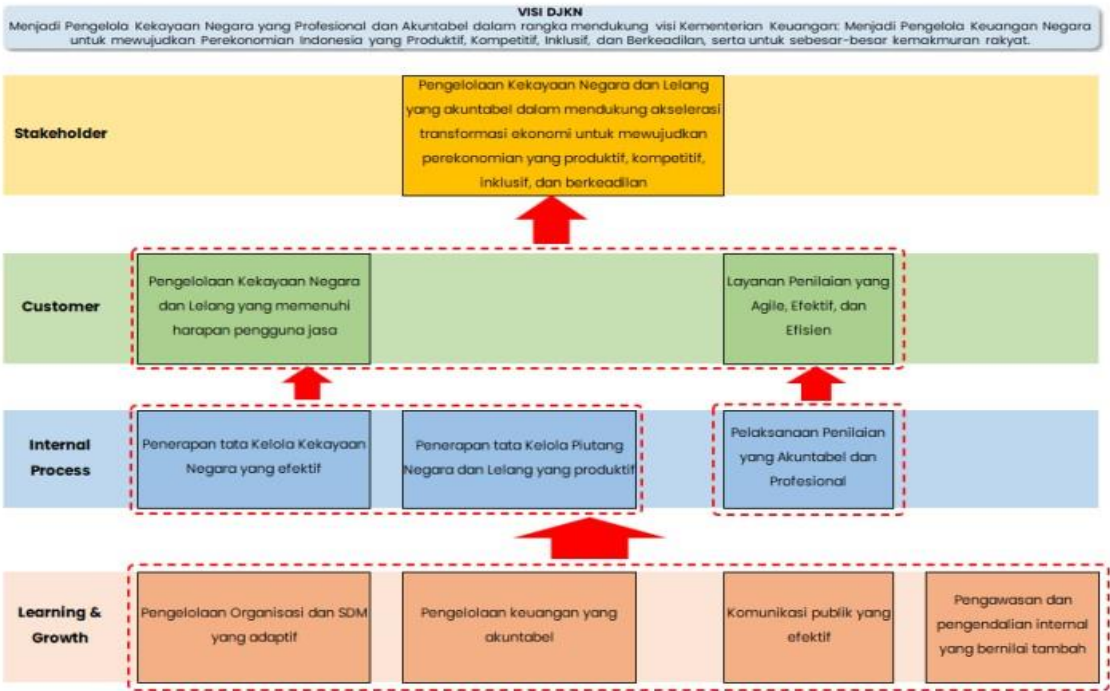
B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Gambaran penetapan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dicapai melalui penetapan 20 (dua puluh) target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

PETA STRATEGI



Peta strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kanwil DJKN Tahun 2024 tersebut terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)	TARGET
Stakeholder Perspective			
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a - CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
	1b - CP	Indeks Integritas	89.17
	1c - CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp615,1 M)
Customer Perspective			

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna Jasa	2a - N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100
		2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
	2b - CP	Persentase realisasi pokok lelang		100 (Rp10.619 M)
	2c - CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara		100 (Rp3.444 M)
3. Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien	3a - N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75
Internal Process Perspective				
4. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a - CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		100
	4b - N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100
5. Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a - CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara		71 (12.354)
	5b - CP	Persentase produktivitas lelang		89
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	6a - CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian		16
Learning and Growth Perspective				
7. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a - N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		85
	7b - N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		100
	7c - N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi		75
8. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a - CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100
	8b - N	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN		10
9. Komunikasi public yang efektif	9a - CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		3.55 (Skala 4)
	9a - N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80
10. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a - N	Indeks efektivitas UKI		82

Program/Kegiatan Tahun 2024:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

- a. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi
- b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
- c. Pengelolaan Aset
- d. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Legislasi dan Litigasi
- b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
- c. Pengelolaan komunikasi dan informasi public
- d. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, Kanwil DJKN DKI Jakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen)
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

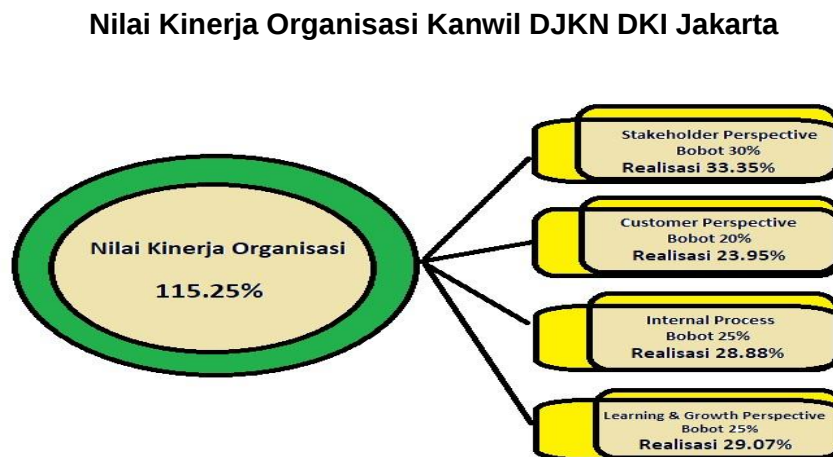
- Capaian Kinerja Organisasi
 - Kinerja Lainnya
 - Realisasi Anggaran
 - Inovasi
 - Penghargaan dan Achievement
- 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 115.25%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2024, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki capaian 20 IKU dengan status hijau.



Catatan Status NKO :

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

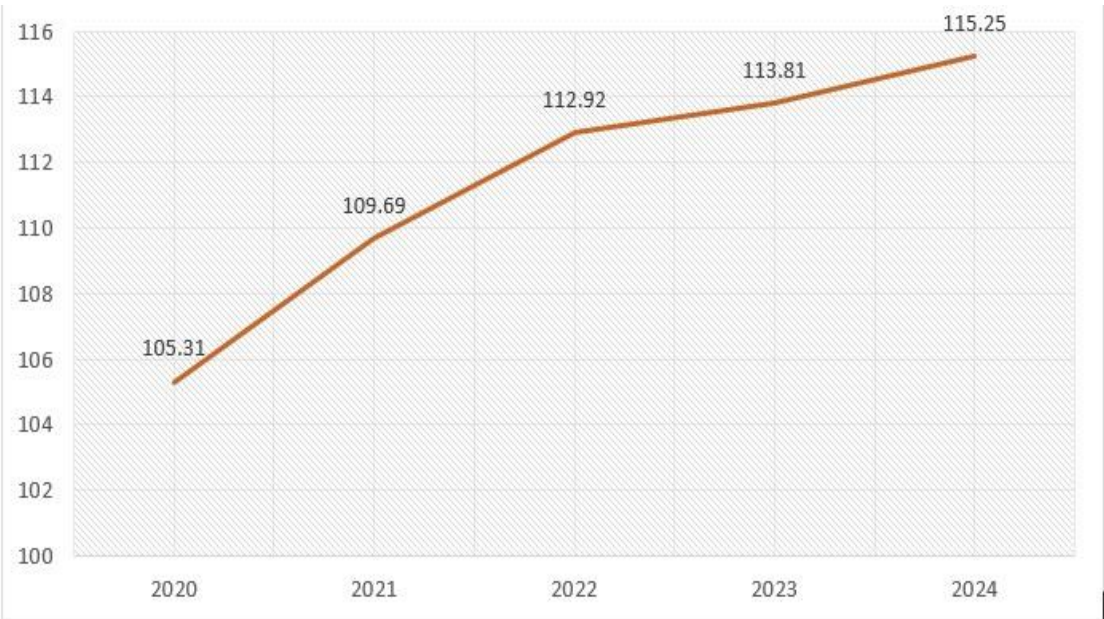
$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024 Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Tahun 2024, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 20 (dua puluh) IKU dengan keseluruhan IKU dengan status hijau.

Adapun tren capaian IKU pada Kanwil DJKN DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Perspektif	2020		2021		2022		2023		2024	
	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Stakeholder	40	38.61	25	29	25	30	30	33.64	30	33.35
Customer	-	-	15	15.68	15	16.13	25	22.62	20	23.95
Internal Process	30	32.59	30	31.39	30	33.96	20	28.81	25	28.88
Learning & Growth	30	34.10	30	33.62	30	32.83	25	28.73	25	29.07
TOTAL NKO		105.31		109.69		112.92		113.81		115.25

Tren NKO Kanwil DJKN DKI Jakarta



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi 31 Des 2024	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (30%)	30%						33.35%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							111.18%	
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	P/L	100%	112.19%	19%	37%	112.19%	112.19%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/L	89.17	92.44	19%	37%	103.67%	103.67%	hijau
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	125.49%	14%	27%	125.49%	120.00%	hijau
	Customer Perspective (20%)	20%						23.95%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna Jasa							120.00%	
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/M	100%	118.56%	14%	33%	118.56%	118.56%	hijau
	Sub IKU 1: 2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71.50%	88.76%			124.14%	120.00%	hijau
	Sub IKU 2: 2a2-N Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/M	86.50%	97.74%			112.99%	112.99%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	122.62%	14%	33%	122.62%	120.00%	hijau
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	P/M	100%	193%	14%	33%	192.93%	120.00%	hijau
3	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien							120.00%	
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	P/M	75	95.89	14%	100%	127.85%	120.00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)	25%						28.88%	
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							112.12%	
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	104.25%	14%	50%	104.25%	104.25%	hijau
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%	132.08%	14%	50%	132.08%	120.00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							114.46%	
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	70%	63.75%	14%	50%	108.93%	108.93%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	108.54%	14%	50%	121.95%	120.00%	hijau
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							120.00%	
6a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16%	0.20%	14%	100%	198.73%	120.00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%						29.07%	
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							118.70%	
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	98.69	14%	33%	116.11%	116.11%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	33%	120.00%	120.00%	hijau
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	P/M	75%	102.70%	14%	33%	136.93%	120.00%	hijau
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							118.61%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100.00	120.00	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
8b-N	Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
9	Komunikasi publik yang efektif							110.00%	
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55	5.02	14%	50%	141.41%	120.00%	hijau
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100.00	14%	50%	125.00%	120.00%	hijau
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							106.37%	
10a-N	Indeks efektivitas UKI	P/M	82	87.22	14%	100%	106.37%	106.37%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115.25%	

Sebagaimana tertera pada tabel diatas, pada tahun 2024 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil memperoleh NKO 115,25% dimana capaian nilai tersebut menandakan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2024 berhasil memenuhi ekspektasi organisasi.

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a. Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. Pengurusan piutang negara; dan
- c. Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Seluruh BMN, KNL (Kekayaan Negara Lainnya), dan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- b. Pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Pengelolaan kekayaan Negara yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta meliputi pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Pengelolaan Negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat diutilisasi, dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan aset Negara, dan dapat meningkatkan PNBPN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
I	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan				111,18%
	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	112.19%	112.19%
	1b-CP	Indeks integritas	89.17	92.44	103.67%
	1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	125.49%	120,00%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	112.19%	112.19%	
Capaian	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	112.19%	112.19%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	112.19%	112.19%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Terdapat 18 (delapan belas) Rekomendasi DJKN yang harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil survei SKPL pada Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Terdapat 3 (tiga) komponen dalam perhitungan IKU ini, yaitu:

1. Hasil survei kepuasan dari pengguna layanan (bobot 85%, survey dilakukan oleh Tim Independen UGM, hasil 4.58)
2. Hasil survey ke stakeholder (bobot 5%, hasil 4.18)
3. Tindak lanjut rekomendasi (bobot 10%, hasil 100%)

b. IKU Indeks Integritas

IKU ini menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu (responden eksternal).

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	
Realisasi	10	20	20	42	42	92.44	92.44	
Capaian	10	20	20	42	42	92.44	92.44	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	103.67%	103.67%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks Integritas	Target	Realisasi
2023	88.67	89.17
2024	89.17	92.44

Sumber: Data olahan

c. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IKU Penerimaan Negara ini berasal dari penerimaan atas pengelolaan BMN, biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1c-CP							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	133,01%	128.55%	128.55%	116.94%	116.94%	125.49%	125.49%	
Capaian	133,01%	128.55%	128.55%	116.94%	116.94%	125.49%	125.49%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	116.94%	116.94%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Terdapat kekurangsesuaian antara target realisasi pokok lelang dengan target bea lelang, sehingga berpotensi tidak tercapainya target bea lelang. Namun demikian, secara keseluruhan target PNBP dapat dipenuhi dan dioptimalisasi melalui PNBP dari pengelolaan aset serta PNBP dari Biad Pengurusan Piutang Negara.

Adapun realisasi masing-masing PNBP secara rinci per KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 84,400,000,000.00	Rp 102,565,665,685.00	121.52%
KPKNL Jakarta II	Rp 158,300,000,000.00	Rp 191,062,760,585.00	120.70%
KPKNL Jakarta III	Rp 51,300,000,000.00	Rp 73,749,687,848.00	143.76%
KPKNL Jakarta IV	Rp 47,350,000,000.00	Rp 67,627,954,025.00	142.83%
KPKNL Jakarta V	Rp 53,450,000,000.00	Rp 65,004,202,749.00	121.62%
Total Target/Realisasi	Rp 394,800,000,000.00	Rp 500,010,270,892.00	126.65%

Realisasi PNBP dari Biad Piutang Negara

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 7,500,000,000.00	Rp 8,198,519,768.28	109.31%
KPKNL Jakarta II	Rp 2,500,000,000.00	Rp 3,277,575,462.40	131.10%
KPKNL Jakarta III	Rp 4,000,000,000.00	Rp 957,260,766.14	23.93%
KPKNL Jakarta IV	Rp 5,245,700,000.00	Rp 22,079,363,364.00	420.90%
KPKNL Jakarta V	Rp 15,600,000,000.00	Rp 56,239,861,431.06	360.51%
Total Target/Realisasi	Rp 34,845,700,000.00	Rp 90,752,580,791.88	260.44%

Realisasi PNBP dari Bea Lelang

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 24,600,000,000.00	Rp 17,837,529,522.00	72.51%
KPKNL Jakarta II	Rp 25,200,000,000.00	Rp 28,863,663,953.00	114.54%
KPKNL Jakarta III	Rp 28,800,000,000.00	Rp 37,369,913,074.00	129.76%
KPKNL Jakarta IV	Rp 27,600,000,000.00	Rp 15,147,721,839.00	54.88%
KPKNL Jakarta V	Rp 32,800,000,000.00	Rp 23,924,273,557.00	72.94%
PL II	Rp 46,439,000,000.00	Rp 57,938,907,329.00	124.76%
Total Target/Realisasi	Rp 185,439,000,000.00	Rp 181,082,009,274.00	97.65%

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Target	Realisasi
2020	100%	132,65%
2021	100%	135,97%
2022	100%	169,18%
2023	100%	125,16%
2024	100%	125,49%

Sumber: Data olahan

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				119,52%
	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	118,56%	118.56%
		Sub IKU: 2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.50%	88.76%	124.14%
		Sub IKU: 2a2-N Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86.50%	97.74%	112.99%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	122,62%	120.00%
	2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	192.93%	120.00%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu:

- 1) Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).
- 2) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi		182%	182%	150.82%	150.82%	118.56%	118.56%	
Capaian		182%	182%	150.82%	150.82%	118.56%	118.56%	
Nilai Kinerja		120%	120%	120%	120%	118.56%	118.56%	

IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara terdiri dari 2 Sub-IKU yaitu:

1. Sub IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar Barang dan Standar Kebutuhan dengan capaian 120%
2. Sub IKU Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN dengan capaian 112.99%

b. IKU Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,01%	116,09%	116,09%	121,79%	121,79%	122,62%	122,62%
Capaian	118,01%	116,09%	116,09%	121,79%	121,79%	122,62%	122,62%
Nilai Kinerja	118,01%	116,09%	116,09%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Realisasi Pokok Lelang

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 570.300.000.000.00	Rp 520.312.279.591.00	91.23%
KPKNL Jakarta II	Rp 600.000.000.000.00	Rp 763.509.310.379.00	127.25%
KPKNL Jakarta III (adendum)	Rp 716.433.500.000.00	Rp 987.330.711.544.00	137.81%
KPKNL Jakarta IV	Rp 600.200.000.000.00	Rp 433.091.700.165.00	72.16%
KPKNL Jakarta V	Rp 800.200.000.000.00	Rp 694.633.006.380.00	86.81%
Kanwil DKI Jakarta	Rp 7.349.204.000.000.00	Rp 9.643.017.064.264.00	131.21%
Total Target/Realisasi	Rp 10.636.337.500.000.00	Rp 13.041.894.072.323.00	122.62%

Capaian IKU Realisasi pokok lelang pada KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta V masih berwarna kuning, sedangkan pada KPKNL Jakarta IV berwarna merah, namun demikian secara keseluruhan target IKU sampai dengan Q4 dapat tercapai sebesar 122.62%.

Perbandingan IKU

	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2020	100	8.327.583.000.000	106,13	8.838.088.259.376
2021	100	8.983.000.000.000	113,24	10.172.471.116.741
2022	100	9.050.000.000.000	106,3	9.620.102.549.336
2023	100	5.457.030.474.844	134,41	13.593.529.619.527
2024	100	10.636.337.500.000	122.62	13.041.894.072.323

Sumber: Data olahan

c. IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset *debt swap*.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2c-CP							
	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	103%	146.58%	146.58%	112.32%	112.32%	192.93%	192.93%	
Capaian	103%	146.58%	146.58%	112.32%	112.32%	192.93%	192.93%	
Nilai Kinerja	103%	120%	120%	112.32%	112.32%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Realisasi penurunan outstanding Piutang Negara pada KPKNL lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Realisasi Penurunan Outstanding Piutang Negara

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I (adendum)	Rp 697,460,000,000.00	Rp 764,471,984,032.15	109.61%
KPKNL Jakarta II	Rp 495,000,000,000.00	Rp 556,256,630,672.24	112.38%
KPKNL Jakarta III	Rp 600,000,000,000.00	Rp 3,162,386,110,560.20	527.06%
KPKNL Jakarta IV	Rp 300,000,000,000.00	Rp 332,821,963,398.96	110.94%
KPKNL Jakarta V	Rp 1,599,290,000,000.00	Rp 2,306,539,711,096.00	144.22%
Total Target/Realisasi	Rp 3,691,750,000,000.00	Rp 7,122,476,399,759.55	192.93%

Capaian IKU Persentase penurunan outstanding Piutang Negara pada KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta V pada Q4 berwarna hijau dan secara keseluruhan tercapai sebesar 192.93%.

Perbandingan Capaian IKU

Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara	Target	Realisasi
2020	3%	0,52%
2021	100%	118,78%
2022	100%	141,8%
2023	100%	119,70%
2024	100%	192,93%

Sumber: Data olahan

3. Sasaran Strategis: Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
3	Layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien				120.00%
	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian	75	95,89	127.85%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	
Realisasi	93,96	94	94	93.82	93.82	95.89	95.89	
Capaian	93,96	94	94	93.82	93.82	95.89	95.89	
Nilai Kinerja	120	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN.
- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN.
- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN.
- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis
- Penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

*Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku.

**Jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada Kepdirjen Nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, 69/KN/2023

4. Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian dalam proses pengelolaan kekayaan negara. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif				112,12%
	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	104.25%	104.25%
	4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	132.08%	132.08%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	4a-CP							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	20%	51.84%	51.84%	77.54%	77.54%	104.25%	104.25%	
Capaian	20%	51.84%	51.84%	77.54%	77.54%	104.25%	104.25%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	104.25%	104.25%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Realisasi Sertipikasi

Unit	Target Q4 (NUP)	Realisasi Desember (NUP)	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	2859	2907	101.68%
KPKNL Jakarta II	82	109	132.93%
KPKNL Jakarta III	126	159	126.19%
KPKNL Jakarta IV	31	38	122.58%
KPKNL Jakarta V	103	124	120.39%
Total Target/Realisasi	3201	3337	104.25%

Capaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan pada KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta V pada Q4 berwarna hijau dan secara keseluruhan tercapai sebesar 192.93%. Capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang baik antara Kanwil/KPKNL dengan Direktorat PKKN DJKN, Satker, Kantor Pertanahan dan Kanwil BPN.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertifikatkan	Target	Realisasi
2020	2	6
2021	180	156
2022	1.404	1.633
2023	100%	114.89%
2024	100%	104.25%

b. IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu:

1. Kepentingan umum.
2. Manfaat sosial.
3. Kepuasan pengguna.
4. Potensi penggunaan masa mendatang.
5. Kelayakan finansial.
6. Kondisi teknis.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	4b-N							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	14,38%	40.35%	40.35%	90.39%	90.39%	133.29%	132.08%	
Capaian	14,38%	40.35%	40.35%	90.39%	90.39%	133.29%	132.08%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	113%	113%	120%	120%	

Cara penghitungan IKU ini adalah:

(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya / Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya) x 80% + (Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker) x 20%.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Target	Realisasi
2022	100%	113.69%
2023	100%	125.11%
2024	100%	132.08%

Sumber: Data olahan

5. Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif

Tata kelola yang produktif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang memberikan nilai tambah.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif				114.46%
	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	63.75%	108.93%	108.93%
	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	108.54%	121.95%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jo. PP No. 28 Tahun 2022 jo. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target		96%	92%	92%	85%	85%	70%	70%
Realisasi		93,89%	90.19%	90.19%	80.02%	80.02%	63.75%	63.75%
Capaian		93,89%	90.19%	90.19%	80.02%	80.02%	63.75%	63.75%
Nilai Kinerja		102,19%	101.97%	101.97%	105.86%	105.86%	108.93%	108.93%

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Cara penghitungan IKU:

IKU ini dihitung berdasarkan Persentase saldo BKNP = Saldo Akhir Periode Berjalan / Saldo Awal Tahun 2024.

Realisasi Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Unit	Saldo Awal	Target Q4		Realisasi Desember		% Capaian thd Q4
		Berkas	%	Berkas	%	
KPKNL Jakarta I (adendum dari 527 menjadi 526)	600	526	88%	521	86.83%	101.33%
KPKNL Jakarta II (revisi target 2077 menjadi 2060)	4577	2060	45%	1886	41.21%	108.43%
KPKNL Jakarta III (revisi target 2221 menjadi 2207)	3246	2207	68%	1752	53.97%	120.63%
KPKNL Jakarta IV	3263	2413	74%	2033	62.30%	115.80%
KPKNL Jakarta V (revisi target 5103 menjadi 5080)	5773	5080	88%	4938	85.54%	102.80%
Total Target/Realisasi	17459	12286	70%	11130	63.75%	108.93%

b. IKU Persentase produktivitas lelang

Tujuan dari IKU Persentase produktivitas lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP Persentase produktivitas lelang							
	T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target		30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
Realisasi		54,36%	75.11%	75.11%	81.55%	81.55%	108.65%	108.65%
Capaian		54,36%	75.11%	75.11%	81.55%	81.55%	108.65%	108.65%
Nilai Kinerja		120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang yang laku per jenis lelang. Adapun formula penghitungannya adalah: $((\% \text{ lot laku lelang per jenis lelang} / \text{target } \% \text{ lot laku lelang per jenis lelang}) / \text{jumlah jenis lelang yang dilaksanakan}) * 40\% + ((\text{jumlah realisasi frekuensi lelang} / \text{target frekuensi lelang}) * 60\%)$.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase produktivitas lelang	Target	Realisasi
2020	34%	39,48%
2021	35%	58,48%
2022	36%	60,16%
2023	80%	109,77%
2024	89%	108.54%

Sumber: Data olahan

6. Sasaran Strategis: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional				120,00%
	6a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,20%	198,73%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional						
	6a-CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Realisasi	0,74%	0.49%	0.49%	0.34%	0.34%	0.20%	0.20%
Capaian	0,74%	0.49%	0.49%	0.34%	0.34%	0.20%	0.20%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I s.d. KPKNL Jakarta V telah melakukan penilaian dengan akurat, sehingga rata-rata nilai deviasi ketergunaan hasil penilaian hanya sebesar 0.20% per Desember 2024.

Perbandingan Capaian IKU

Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Target	Realisasi
2020	30%	3,85%
2021	22%	4,47%
2022	19%	2,89%
2023	25%	3,80%
2024	16%	0.20%

Sumber: Data olahan

7. Sasaran Strategis: Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat kualitas pengelolaan SDM mengukur kualitas aspek pengelolaan SDM yang meliputi :

1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kompetensi dan Talenta Tingkat kualitas pengelolaan SDM mengukur kualitas aspek pengelolaan SDM meliputi:
 - 1) Kualitas Kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi pegawai, dan
 - 2) kualitas pengelolaan karir SDM melalui kualitas implementasi Manajemen Talenta.
2. Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk mendukung Kebijakan dan Layanan SDM Komponen ini mengukur kualitas data SDM melalui 3 indikator, yaitu:
 - 1) Persentase Deklarasi Data SDM dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP pada HRIS;
 - 2) Persentase Penyelesaian Validasi dan Approval Data SDM pada HRIS;
 - 3) Indeks Pemanfaatan Data HRIS.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif				118,70%
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		85	98.69	116.11%
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		100%	120.00%	120.00%
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi		75%	102.70%	136.93%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	
Realisasi	99.6	96.91	96.91	98.66	98.66	98.69	98.69	
Capaian	99.6	96.91	96.91	98.66	98.66	98.69	98.69	
Nilai Kinerja	117,18%	114.01%	114.01%	116.07%	116.07%	116.11%	116.11%	

Realisasi IKU ini dapat tercapai dengan melaksanakan event serta melengkapi dokumen-dokumen sesuai target dan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam form assesmen.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Target	Realisasi
2023	80	97.63
2024	85	98.69

Sumber: Data olahan

b. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai tusi.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
	7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	21,49%	71.64%	71.64%	120%	120%	120%	120%
Capaian	21,49%	71.64%	71.64%	120%	120%	120%	120%
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Pemetaan diklat para pegawai.
2. Pemantauan pemenuhan jamlat para pegawai.
3. Reminder target pemenuhan jamlat para pegawai.

Perbandingan Capaian IKU

Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Target	Realisasi
2020	100%	120%
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	100%	120%
2024	100%	120%

Sumber: data olahan

c. IKU Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan kesamaan persepsi, percepatan internalisasi, dan menggali aspirasi Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan setidaknya pada unit kerja dan *stakeholder* terkait dimana yang bersangkutan ditugaskan.

Tujuan IKU adalah untuk memastikan program kerja Duta Transformasi diselesaikan dengan baik.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif						
	7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi						
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24
Target	5%	20%	20%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	5%	51.25%	51.25%	94.7%	94.7%	102.7%	102.7%
Capaian	5%	51.25%	51.25%	94.7%	94.7%	102.7%	102.7%
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Penghitungan IKU:

Q1: - Apabila unit kerja telah mengusulkan Duta Transformasi, realisasi = 5%

- Apabila unit kerja belum mengusulkan Duta Transformasi, realisasi = 0%

Q2-Q4 = Realisasi Q1 + Realisasi program kerja Dutra Transformasi berdasarkan hasil perhitungan CTO.

8. Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya ouput, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120.00%
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100.00	120.00	120.00%
8b-N	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN		10%	0.00%	200.00%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	116,67	102,51	102,51	116,59	116,59	120,00%	120,00%	
Capaian	116,67	102,51	102,51	116,59	116,59	120,00%	120,00%	
Nilai Kinerja	116,67%	102,51%	102,51%	116,59%	116,59%	120,00%	120,00%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Cara penghitungan IKU:

1. Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III = 100% = Nilai IKPA dengan target 95.0 indeks 100.
2. Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91.0 indeks 100.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Target	Realisasi
2022	95.5%	91.54%
2023	100	97.99
2024	100	120

Sumber: data olahan

b. IKU Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785

Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah 10%.

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- c. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8b-N Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realisasi	0,26%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Capaian	0,26%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan Capaian IKU

Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Target	Realisasi
2020	N/A	N/A
2021	12,5%	0,15%
2022	10%	1,03%
2023	15%	0,34%
2024	10%	0,00%

Sumber: Data olahan

9. Sasaran Strategis: Komunikasi publik yang efektif

Objek penelitian dalam komunikasi publik yang efektif adalah adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.

No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
9	Komunikasi publik yang efektif				120.00%
	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	5.02	141.41%
	9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100.00	125.00%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU ini mengukur:

1. Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot : 50%), yang terdiri atas:
 - (a) Capaian efektivitas komunikasi publik (40%).
 - (b) Partisipasi agenda setting (20%).
 - (c) Employee Advocacy (20%).
 - (d) Capaian penguatan hubungan kelembagaan negara dan/atau masyarakat (20%).
2. Pengelolaan Opini Negatif pemberitaan terhadap Kemenkeu (bobot 50%%), yang terdiri atas:
 - (a) Persentase Opini Negatif pada media massa dan media sosial (bobot 55%, target 12,8%).
 - (b) Penanganan Opini Negatif (bobot 45%, target 60-69%) pada media massa dan media sosial.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Komunikasi Publik yang Efektif							
	9a-CP							
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	
Realisasi	4,92	5.23	5.23	4.48	4.48	5,02	5,02	
Capaian	4,92	5.23	5.23	4.48	4.48	5,02	5,02	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan adalah:

1. Optimalisasi konten social media Kanwil DJKN DKI Jakarta.
2. Optimalisasi amplifikasi konten Employee Advocacy.

Perbandingan Capaian IKU

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Target	Realisasi
2022	3.55	3.77
2023	3.55	4.55
2024	3.55	5.02

Sumber: Data olahan

b. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Komunikasi Publik yang Efektif							
	9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Cara penghitungan IKU:

Realisasi IKU = 60% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi) + 20% (Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik) + 20% (Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website).

10. Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif dan bernilai tambah apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan serta memberikan nilai tambah bagi organisasi.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			106.37%
10a-N	Indeks efektivitas UKI	82	87.22	106,37%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. IKU Indeks efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN DKI Jakarta	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	10a-N Indeks efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	
Realisasi	5	15	15	20	20	82	87.22	
Capaian	5	15	15	20	20	82	87.22	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106.37%	

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (Bobot 25%).
 - 1) Komitmen Pimpinan (7,5%).
 - 2) Dukungan Sumber Daya Manusia (7,5%).

- 3) Akses Data dan Informasi (5%).
- 4) Komunikasi (5%).
- 2. Komponen Proses (25%).
 - 1) Pemilihan Probis yang dipantau (4%).
 - 2) Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%).
 - 3) Profiling Pegawai (4%).
 - 4) Penyusunan Program Kerja (3%).
 - 5) Pelaksanaan Pemantauan (3%).
 - 6) Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%).
 - 7) Pelaporan Pengendalian Internal (4%).
- 3. Komponen Hasil (Bobot 50%).
 - 1) Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%).
 - 2) Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%).
 - 3) Kejadian Tangkap Tangan (20%).

B. Kinerja Lainnya

1. ALCo (Asset & Liabilities Committee) Regional DKI Jakarta

Kolaborasi dan sinergi antar Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan Menteri Keuangan sangat diperlukan dalam rangka mendukung peran sebagai *Regional Chief Economist* (RCE), meningkatkan kualitas *Cash Planning Information Network* (CPIN), membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pelaksanaan APBN dan APBD, serta mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, dibentuklah ALCo (*Asset & Liabilities Committee*) Regional yang merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo ditingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat lokal atau regional.

ALCo Regional memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Memantau pencapaian APBN dan APBD setiap bulannya.
- 2) Menyusun proyeksi realisasi APBN dan APBD.
- 3) Menganalisis hubungan keuangan APBN dan APBD.
- 4) Menganalisis dampak operasi pemerintah di daerah.
- 5) Menganalisis peluang dan kebutuhan investasi regional.
- 6) Menganalisis isu lokal strategis yang dapat berdampak secara nasional.

Forum ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta terdiri dari perwakilan Kemenkeu satu dari DJPB, DJP, DJBC dan DJKN melakukan 4 (empat) kali kegiatan setiap bulan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi pokja teknis penyiapan data dan konsep analisis Alco (Peserta Pejabat Pengawas dan staf).
- Rapat koordinasi ALCo Regional tingkat Deputies (Pejabat Administrator).
- Rapat koordinasi ALCo Regional tingkat Komite (Pejabat Eselon II).
- Konferensi Pers ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta.

Konferensi Pers ALCo Regional memaparkan perkembangan kinerja APBN s.d. akhir periode bulan sebelumnya yang terdiri dari Penerimaan (Pajak, Bea Cukai, PNBP) dan Pengeluaran (belanja), defisit APBN dan perkembangan indikator perekonomian, serta Perkembangan APBD.

2. Asistensi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM)

Kanwil DJKN DKI Jakarta telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) pada tahun 2023. Selama tahun 2024, Kanwil DJKN DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga keberlangsungan implementasi ZI WBBM dengan meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholder*. Terkait dengan keberhasilan meraih predikat ZI WBBM, Kanwil DJKN DKI Jakarta turut mendukung unit kerja lainnya untuk meraih predikat yang sama. Hal tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan asistensi melalui berbagai diskusi dan *sharing knowledge* antara lain:

- 1) Asistensi pembangunan ZI WBBM kepada unit kerja di luar Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum pada instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 2) Asistensi pembangunan ZI WBBM kepada unit kerja di Kementerian Keuangan yaitu kegiatan Study Visit Best Practice Pembangunan ZI WBBM dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 November 2024. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka *benchmarking* dan meningkatkan pengetahuan para pegawai DJPK terkait strategi dalam pembangunan ZI WBBM pada Kanwil DJKN DKI Jakarta.
- 3) Asistensi pembangunan ZI WBBM kepada unit kerja di lingkungan DJKN, yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN, dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum secara daring.

3. Lelang Produk UMKM/Disabilitas

- 1) Pameran Lukisan dan Lelang Sukarela berupa Lukisan bertajuk Warna Dalam Hening

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Hari Ibu dan Pengarusutamaan Gender pada Kamis 12 Desember 2024 di Gedung AA Maramis. Kanwil DJKN DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta, Perhimpunan Balai Lelang Indonesia (Perbali), Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I) dan Komunitas Peduli Inklusi Kemenkeu (KOMPLEMEN).

- 2) Lelang Produk UMKM

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Orang RI (HORI) ke-78 dan Hari Kekayaan Negara ke-18 pada hari Selasa 22 Oktober 2024 di Pendopo Parapattan. Kanwil DJKN DKI Jakarta bekerja dengan Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I) melaksanakan lelang produk UMKM sebagai upaya Kanwil DJKN DKI Jakarta ikut mendukung pemberdayaan UMKM. Produk UMKM yang dilelang berupa kain batik ciprat karya sahabat disabilitas mental binaan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Waluyotomo Jepara dan produk UMKM lainnya.

4. Crash Program Keringanan Utang

Program keringanan utang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Tahun Anggaran 2024. PMK ini mengatur penyelesaian berkas kasus Piutang Negara (BKPN) dengan mekanisme *Crash Program* terhadap Piutang Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria yaitu:

- 1) Penanggung Utang berupa perorangan atau badan hukum/badan usaha, yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya tanpa keringanan.
- 2) Sisa kewajiban Penanggung Utang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN.
- 4) Proses pengurusan pada PUPN telah diterbitkan SP3N sampai dengan 31 Desember 2023, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan sampai dengan tahun 2023 atau diterbitkan surat paksa dan merupakan Piutang Instansi Pemerintah yang telah tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat Tahun 2020 atau laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, untuk berkas kasus Piutang Negara penyerahan tahun 2024.

- 5) Penerbitan SP3N dan surat paksa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara.

Capaian Crash Program Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2022 dan 2024

No.	Unit Kerja	Target 2022	Realisasi s.d. 31 Desember 2022	%	Target 2023	Realisasi s.d. 31 Desember 2023	%	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024	%
1	KPKNL Jakarta I	19	32	168.42%	25	54	216.00%	26	45	173.08%
2	KPKNL Jakarta II	123	138	112.20%	256	269	105.08%	125	129	103.20%
3	KPKNL Jakarta III	172	208	120.93%	45	77	171.11%	24	35	145.83%
4	KPKNL Jakarta IV	235	429	182.55%	171	263	153.80%	94	176	187.23%
5	KPKNL Jakarta V	58	70	120.69%	144	178	123.61%	100	146	146.00%
6	Kanwil	607	877	144.48%	641	841	131.20%	369	531	143.90%

C. Realisasi Anggaran

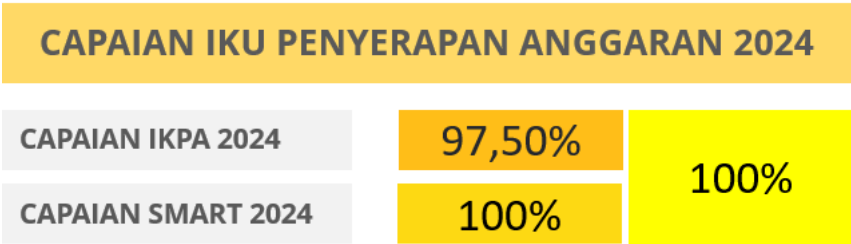
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp14,756,641,000,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan realisasi DIPA untuk semua jenis belanja sebesar Rp14.382,044,252,- (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) sehingga saldo Rp374,596,748,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Rincian realisasi DIPA Kanwil DJKN DKI Jakarta per Bagian/Bidang untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

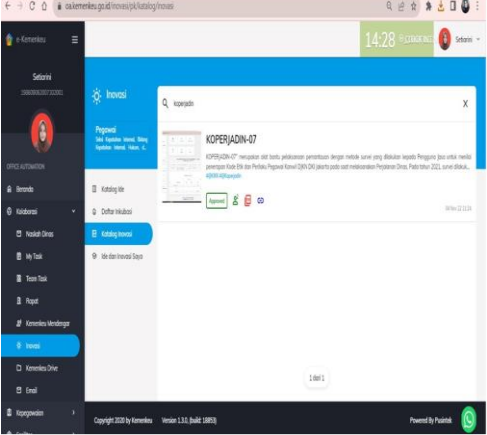
MONITORING RPD DAN REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024

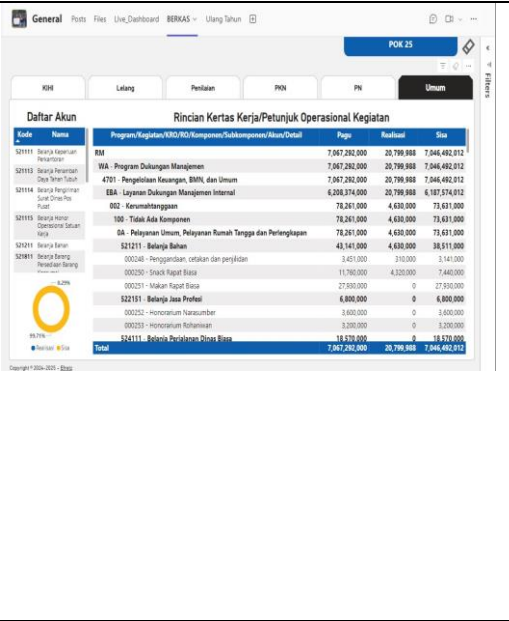
	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%PENYERAPAN
BAGIAN UMUM	13,138,509,000	13,036,515,928	101,993,072	99.22%
BIDANG PKN	1,050,563,000	822,538,115	228,024,885	78.29%
BIDANG PENILAIAN	118,684,000	117,221,527	1,462,473	98.77%
BIDANG PIUTANG NEGARA	116,014,000	101,232,225	14,781,775	87.26%
BIDANG LELANG	256,595,000	230,248,137	26,346,863	89.73%
BIDANG KIH	76,276,000	74,288,320	1,987,680	97.39%
TOTAL	14,756,641,000	14,382,044,252	374,596,748	97.46%

Adapun capaian IKU Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

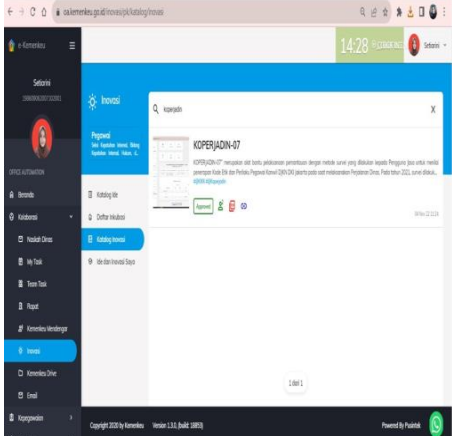


D. Inovasi

No	Narasi	Keterangan
1.	KOPERJADIN-07 (Kode Etik dan Perilaku Pegawai pada saat Melakukan Perjalanan Dinas). Aplikasi KOPERJADIN 07 digunakan untuk melaksanakan pemantauan terhadap pegawai yang menjalankan dinas tanpa harus datang ke lokasi dinas. Pegawai pada pelaksana KI cukup mengirimkan alamat KOPERJADIN dan unit tujuan bisa langsung memberikan <i>feedback</i> terhadap pegawai yg dinas.	
2.	Aplikasi AISYAH (Aplikasi Informasi dan Layanan SDM/HRIS) Banyaknya aplikasi di Kementerian Keuangan/DJKN terkait Kepegawaian seperti DIANAS, SIMPEG, HRIS, Aplikasi Diklat dan Alika maka untuk mempercepat dan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi, diluncurkan Aplikasi AISYAH alamat https://heylink.me/AISYAHDJKNDKI/ yaitu aplikasi internal Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk keperluan informasi kepegawaian (informasi satu pintu).	

3.	Beranda Keuangan Satker (BERKAS) Memfaatkan kelebihan aplikasi Power BI pada Microsoft 365, Efretz Lorens, Jafung Pranata Keuangan APBN Mahir, membuat alat monitoring realisasi anggaran BERKAS dengan menggunakan data dari format Excell cetakan aplikasi SAKTI yang ditautkan dengan sharepoint dan divisualisasikan dengan Power BI. Manfaat BERKAS antara lain meminimalisir potensi kesalahan input atas penyajian data yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui link google drive.	
----	--	--

E. Penghargaan dan Achievement

No	Narasi	Keterangan								
1.	KOPERJADIN-07 Kanwil DJKN DKI Jakarta (Kode Etik dan Perilaku Pegawai pada saat Melakukan Perjalanan Dinas) sebagai Peringkat Terbaik Keempat. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-130/KN/2024 tentang Penetapan Inovasi Terbaik Pada Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara Tahun 2024, Aplikasi KOPERJADIN-07 ditetapkan sebagai Peringkat Terbaik Keempat.									
2.	Penghargaan Nagara Dana Ksatria Inspirasi Kategori Pegawai an. Setiarini pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pejabat/Pegawai dan unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Pejabat/Pihak Lainnya di Luar Kementerian Keuangan Tahun 2024.	LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382 TAHUN 2024 D. Penerima Penghargaan Nagara Dana Ksatria 2. Nagara Dana Ksatria Inspirasi a. Kategori Pegawai <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th><th>Deskripsi / Kinerja / Prestasi / Jasa</th></tr><tr><td>1.</td><td>Setiarini NIP 198609062007102001</td><td>Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara</td><td>1. Menginisiasi dan melaksanakan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Energi Penghematan UMKM dan melaksanakan UMKM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar UMKM bisnisnya. 2. Mengembangkan platform aplikasi KOPERJADIN- 07 (Kode Etik Perjalanan Dinas).</td></tr></table> MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tel., SRI MULYANI ENDIKAWATI Periksa sesuai dengan arahan Kepala Biro Keuangan Dana Managemen,  Revisi	No.	Nama	Jabatan	Deskripsi / Kinerja / Prestasi / Jasa	1.	Setiarini NIP 198609062007102001	Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	1. Menginisiasi dan melaksanakan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Energi Penghematan UMKM dan melaksanakan UMKM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar UMKM bisnisnya. 2. Mengembangkan platform aplikasi KOPERJADIN- 07 (Kode Etik Perjalanan Dinas).
No.	Nama	Jabatan	Deskripsi / Kinerja / Prestasi / Jasa							
1.	Setiarini NIP 198609062007102001	Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	1. Menginisiasi dan melaksanakan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Energi Penghematan UMKM dan melaksanakan UMKM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar UMKM bisnisnya. 2. Mengembangkan platform aplikasi KOPERJADIN- 07 (Kode Etik Perjalanan Dinas).							

3.	Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai Juara III Kategori Kanwil pada kegiatan Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) Lelang Terbaik Tahun 2024 yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sesuai Piagam Nomor: PIAG-34/KN/2024 tanggal 16 Mei 2024	 The image shows a framed certificate titled 'Piagam Penghargaan' (Award Certificate). It is awarded to 'KANWIL DJKN DKI JAKARTA' as the 'Juara III Kategori Kanwil Sosialisasi dan Edukasi (SOLID) Lelang Terbaik Tahun 2024'. The certificate is signed by 'RIONALD SILABAN', the Director General of State Assets, on May 16, 2024, in Jakarta.
4.	Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai Prestasi Terbaik II pada kegiatan Nilai Kinerja Organisasi Semester I Tahun 2024 yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sesuai Piagam Nomor: PIAG-49/KN/2024 tanggal 24 Juli 2024	 The image shows a framed certificate titled 'PIAGAM PENGHARGAAN' (Award Certificate). It is awarded to 'KANWIL DJKN DKI JAKARTA' as the 'Prestasi Terbaik II' (Best Achievement II) for 'NILAI KINERJA ORGANISASI SEMESTER I TAHUN 2024'. The certificate is signed by 'RIONALD SILABAN', the Director General of State Assets, on July 24, 2024, in Jakarta.



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kanwil DJKN DKI Jakarta selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, sekaligus pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis Tahun 2020 - 2024.

LAKIN Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat dikatakan berhasil/baik. Secara umum kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) dan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja mencapai 115,25% (memenuhi ekspektasi).
- b. Dari 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2024, seluruh IKU dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi pemecahan masalah untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang akan diterapkan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelayanan dan melakukan sosialisasi yang terus menerus terhadap *stakeholder* dan *customer*.
- b. Meningkatkan kompetensi para pegawai pada bidang-bidang teknis (Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Bidang Penilaian) dalam rangka

- pencapaian target Revaluasi BMN dan penilaian asset melalui diklat teknis maupun diklat penyegaran (*capacity building*).
- c. Bersama-sama dengan KPKNL melakukan penggalan potensi ke satker K/L untuk lebih meningkatkan optimalisasi aset.
 - d. Meningkatkan capaian target pendapatan negara melalui lelang dan piutang Negara lebih sering dilakukan.
 - e. Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada satker-satker di wilayah kerja.

Semua yang dicapai saat ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL yang berada di wilayah kerjanya, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Untuk itu agar selalu berkomitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama, kebersamaan, sinergi dan kolaborasi seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, jajaran KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta maupun para pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN DKI Jakarta, sehingga pada akhirnya dapat dijadikan barometer pencapaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan memberikan masukan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK- 19/KN/2024
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

VISI DJKN

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp615,1 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2a2-N	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp10.619 M)
		2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp3.444 M)
3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71 (12.354)
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	89
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	6a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
9	Komunikasi publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55 (Skala 4)
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks efektivitas UKI	82

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
Program :			
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp	1.328.816.000
Kegiatan			
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	93.470.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	411.870.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp	788.521.000
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	34.955.000
Program :			
Dukungan Manajemen		Rp	13.259.087.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	61.586.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	13.178.811.000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	13.080.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	5.610.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
NIP 19660423 1990101001



Ditandatangani secara elektronik
Mahmudsyah
NIP 196407161991031001



RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	20	50	50	70	70	100	100
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	2a2-N Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
2c-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	-	40	40	60	60	100	100
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	92	92	85	85	71	71

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
9	Komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta,



Ditandatangani secara elektronik
Mahmudsyah
NIP 196407161991031001



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI 2024 SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	Mahmudsyah	1	NAMA	Rionald Silaban	
2	NIP	196407161991031001	2	NIP	19660423 1990101001	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya/ IV.d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama/ IV.e	
4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta	4	JABATAN	Direktur Jenderal	
5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
A. UTAMA						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan		100	Penerima Layanan
			Indeks integritas		89,17	
			Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		100	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100	Customer
			Sub IKI 1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	
			Sub IKI 2	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	
			Persentase realisasi pokok lelang		100	

		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	
3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Customer
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Internal Process
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71	Internal Process
		Persentase produktivitas lelang	89	
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	Internal Process
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Learning and Growth
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	
		Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75	
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Learning and Growth
		Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10	
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)	Learning and Growth
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Learning and Growth

B. TAMBAHAN				
1	-	-	-	-
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
2	Akuntabel			
	• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
3	Kompeten			
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
4	Harmonis			
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
5	Loyal			
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	
6	Adaptif			
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

	• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah
NIP 196407161991031001

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 19660423 1990101001

Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31
Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
	68 (enam puluh delapan) pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta
	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20	50	50	70	70	100	100
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100	100	100	100	100	100
	Sub IKI 1 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	60	60	71,5	71,5	71,5
	Sub IKI 2 Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	92	92	85	85	71	71
11	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89	89

12	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	16	16	16	16	16	16
13	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85	85
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	100	100
15	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75	75
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)
19	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah
NIP 196407161991031001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 SEPTEMBER s.d. 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Arif Bintarto Yuwono	1	NAMA	Rionald Silaban
2	NIP	197109121997031001	2	NIP	19660423 1990101001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya/ IV.d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama/ IV.e
4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta	4	JABATAN	Direktur Jenderal
5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A. UTAMA					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan		100	Penerima Layanan
		Indeks integritas		89,17	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100	Penerima Layanan
		Sub IKI 1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	
		Sub IKI 2	Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	
		Persentase realisasi pokok lelang		100	Penerima Layanan
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara		100	Penerima Layanan

3	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Penerima Layanan
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Penerima Layanan
5	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71	Penerima Layanan
		Persentase produktivitas lelang	89	Penerima Layanan
6	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Proses Bisnis
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75	Proses Bisnis
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal dan Anggaran
		Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal dan Anggaran
9	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55 (Skala 4)	Penguatan Internal dan Anggaran
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal dan Anggaran
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal dan Anggaran

B. TAMBAHAN

1	-	-	-	-
---	---	---	---	---

PERILAKU KERJA*

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	

	• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 12 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja

Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001

**Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek perilaku kerja Pegawai.*

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
	68 (enam puluh delapan) pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta
	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	s.d.Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	-	-	-	70	70	100	100
2	Indeks integritas	-	-	-	30	30	89,17	89,17
3	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	-	-	100	100	100	100
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	100	100	100	100
	Sub IKI 1 Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	-	-	60	60	71,5	71,5
	Sub IKI 2 Tingkat efektivitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	-	-	60	60	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang	-	-	-	100	100	100	100

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	s.d.Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	-	-	-	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	-	-	-	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	-	-	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	80	80	100	100
10	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	-	-	-	85	85	71	71
11	Persentase produktivitas lelang	-	-	-	60	60	89	89
12	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	-	-	16	16	16	16
13	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	-	-	-	85	85	85	85
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	75	75	100	100
15	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	45	45	75	75
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	10	10	10	10
18	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	-	-	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)	3.55 (Skala 4)
19	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	-	-	-	80	80	80	80
20	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	20	20	82	82

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001

Jakarta, 12 September 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001